

**PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DAN
PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Manado)**

*EFFECT OF UTILIZATION OF REGIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AND
FINANCIAL SUPERVISION OF INFORMATION VALUE OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL
REPORTS*

(Study of the Manado Regional Work Unit)

Oleh:

Jezhica S.M. Lengkey¹

Grace B. Nangoi²

Heince R.N. Wokas³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹jezhicasml@gmail.com

²gracebn@yahoo.com

³heincewokas@gmail.com

Abstrak: Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPD/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh BPK Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dan pengawasan keuangan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Manado. Hipotesis ini di uji dengan menggunakan uji t dan uji f. Populasi dalam penelitian ini adalah skpd kota Manado dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 satuan kerja perangkat daerah kota Manado. Pengambilan sampel sebanyak 30 orang. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa telah memenuhi validitas, reliabilitas dan data berdistribusi normal. Hasil penelitian melalui uji T menyatakan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah berpengaruh secara positif terhadap nilai informasi laporan keuangan manajemen daerah dan variabel pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian melalui uji F menyatakan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dan pengawasan keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada satuan kerja perangkat daerah kota Manado. Agar dapat diberikan nilai informasi laporan keuangan daerah terjaga dengan baik, sebaiknya perlu adanya peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dan pengawasan keuangan.

Kata Kunci: pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah, pengawasan keuangan, nilai informasi laporan keuangan

Abstract: Government financial reports are then submitted to the DPD / DPRD and the general public after being audited by the BPK. Local government financial management must be carried out based on good governance. The purpose of this study is to determine the effect of utilizing regional management information systems and financial supervision of value information on local government financial reports on the SKPD of the city of Manado. This hypothesis is tested using the t test and test f. The population in this study was Manado city skpd and the sample in this study amounted to 10 units of work units in the city of Manado. Sampling is 30 people. The results of the analysis in this study show that it has met the validity, reliability and data with normal distribution. The results of the study through the T test state that the variable utilization of the regional management information system has a positive effect on the value of the information of the financial statements of regional management and the financial supervision variable has a positive effect on the value of the local government's financial statement information. The results of the study through the F test stated that the variable utilization of the regional management information system and financial supervision simultaneously had a positive effect on the value of information on local government financial statements in the work unit of the Manado city area. In order to be able to be given the value of information on regional financial statements properly maintained, it is better to need to increase the utilization of information systems in regional management and financial supervision.

Keywords: utilization of regional management information systems, financial supervision, value of financial statement information

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat saat ini dan pendapatan nasional yang semakin meningkat dilihat dari perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPD/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*) yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penggunaan sistem informasi manajemen daerah juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) antara lain: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dan pengawasan keuangan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Akuntansi

Akuntansi adalah transaksi keuangan yang tercerminkan dalam bukti transaksi, kemudian mengalami sebuah proses identifikasi, ukur, catat dan lapor, menghasilkan sebuah output berupa laporan keuangan (Saren, Morasa dan Wokas, 2016).

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan menghususnya dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara (Deddy dan Nordiawan, 2014: 4).

Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*check and balances system*).

Sedangkan yang dimaksud dengan transparansi yaitu informasi keuangan daerah harus mampu menyajikan dan menyediakan informasi yang terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2012:83).

Pengawasan Keuangan

Pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Informasi Manajemen Daerah

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi direalisasikan dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA Keuangan dirancang oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan suatu sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja (Zuliatun, 2017).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil proses akuntansi yang diperuntukan sebagai sarana transfer informasi keuangan terutama kepada lingkungan luar organisasi (eksternal). Sedangkan berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah merupakan bagian dari seluruh hak ataupun kewajiban daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahnya yang dinilai dengan uang maupun semua bentuk kekayaan yang berkaitan terhadap semua hak maupun kewajiban daerah tersebut (Zuliatun, 2017).

Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Pemakai akan mempercayai laporan keuangan jika informasi tersebut dipahami, tidak menyesatkan dan bermanfaat bagi pemakai (Sinarwati, 2015).

Penelitian Terdahulu

Hertanto, Domai dan Amin (2016) dalam penelitiannya dengan judul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Blitar). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan terhadap efektifitas pelaporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan SIMDA Keuangan telah terlaksana dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang sangat berpengaruh sehingga masih belum cukup untuk dikatakan bahwa pelaksanaan SIMDA Keuangan di Kabupaten Blitar telah berjalan secara efektif.

Pujiswara dan Heranati (2014) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Klungkung). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Armando (2013) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah di kota Bukittinggi). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah. Di mana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dan pengawasan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 61 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Untuk pembagian sampel 10 orang kepala sub bagian keuangan dan 20 orang pegawai sub bagian keuangan.

Metode Sampling

Untuk melakukan penelitian ini dilakukan suatu teknik atau metode melalui data tertulis yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan yang merupakan langkah pengumpulan data dengan melakukan tinjauan langsung ke objek penelitian dengan mengajukan surat permohonan kepada pihak terkait untuk dapat membantu selama proses penelitian untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan memberikan informasi yang dibutuhkan. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada kepala bagian dan staf sehubungan dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Penentuan jumlah sampel yang *representative* ditentukan menurut Hair *et al.*

Berdasarkan pengertian diatas maka metode pengambilan sample yang dipakai yaitu bersifat *purposive sampling*. Sample yang ditentukan adalah 30.

Dengan kriteria sampel yaitu:

- a. Kepala sub bagian keuangan
- b. Pegawai sub bagian keuangan

Metode Pengumpulan Data

Data yang didapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data kuesioner dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh pihak instansi pemerintahan mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Jumlah kuesioner yang diberikan kepada responden sebanyak 30 kuesioner, yang didistribusikan langsung oleh peneliti kepada responden.

Metode Analisis

Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas kriteria diukur dengan cara menghitung korelasi antara skor masing masing butir dengan skor total menggunakan teknik korelasi person. Bilamana koefisien korelasi positif dan $> 0,05$ maka indikator yang bersangkutan dianggap valid (Wiboyo dan Edy, 2012: 20).

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini akan menguji data variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Uji ini dilakukan untuk menunjukkan simetris tidaknya distribusi data.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen variabel).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Uji T (Uji Parsial)

Hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai sesuatu hal dan dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Uji parsial atau uji t bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara individu terhadap variabel terikatnya.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model merangkai variasi variabel *independent*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Deskripsi Data

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Pria	18	60%
Wanita	12	40%
TOTAL	30	100%

Sumber: Data hasil jawaban responden yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa responden sebagian besar berpendidikan S1. Hal ini diketahui dari persentase keduanya sebesar 56,66%.

Tabel 2 Gambaran Jabatan Responden

Jabatan	Frekuensi	Presentase
Kepala Bagian	10	33,33%
Pegawai Bagian Akuntansi	20	66,66%
TOTAL	30	100%

Sumber: Data hasil jawaban responden yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado pada Bagian Keuangan jumlah jabatan Pegawai bagian Akuntansi lebih besar dari pada jumlah Kepala Bagian Akuntansi. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 66,66%.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Sistem Informasi Daerah

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
P1	0,615	0,361	Valid
P2	0,695	0,361	Valid
P3	0,693	0,361	Valid
P4	0,671	0,361	Valid
P5	0,695	0,361	Valid
P6	0,693	0,361	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa masing-masing item yang menyusun masing-masing kuesioner memiliki nilai lebih dari 0,05 yang berarti masing-masing item dari variabel pemanfaatan sistem informasi

manajemen daerah, pengawasan keuangan dan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah valid. Dengan demikian syarat validitas dari alat ukur terpenuhi.

Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah	0,763	Reliabel
Pengawasan Keuangan	0,628	Reliabel
Nilai Informasi Laporan Keuangan	0,693	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Hasil uji realibilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan realibel karena telah melewati batas koefisien reliabilitas sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Uji Normalitas

Tabel 5 Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,42961410
Most Extreme Differences	Absolute	,153
	Positive	,132
	Negative	-,153
Test Statistic		,153
Asymp. Sig. (2-tailed)		,071 ^c

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dengan menggunakan uji *One Sample* berdistribusi normal. *Kolmogorof-Smirnov Test* sebesar 0,071 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan data residual

Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	15,361	5,262		2,919	,007		
	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X1)	,592	,223	,459	2,649	,013	,987	1,013
	Pengawasan Keuangan(X2)	,499	,130	,433	3,287	,000	,987	1,013

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Sementara itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10.00. Sehingga pengujian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Correlations

		Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah Pengawasan Keuangan ABS_RES			
Spearman's rho	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah	Correlation Coefficient	1,000	,218	,322
		Sig. (2-tailed)	.	,248	,083
		N	30	30	30
	Pengawasan Keuangan	Correlation Coefficient	,218	1,000	-,163
		Sig. (2-tailed)	,248	.	,391
		N	30	30	30
ABS_RES		Correlation Coefficient	,322	-,163	1,000
		Sig. (2-tailed)	,083	,391	.
		N	30	30	30

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan output pada tabel 7 diketahui bahwa nilai signifikan variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X1) sebesar 0,083 dan variabel Pengawasan Keuangan (X2) sebesar 0,391. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan dari semua variabel independen lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadinya Heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji-t (Uji Parsial)

Tabel 8 Hasil Uji-t (Uji Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,361	5,262		2,919	,007
	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X1)	,592	,223	,459	2,649	,013
	Pengawasan Keuangan(X2)	,499	,130	,433	3,287	,000

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 8, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah

Berdasarkan hasil uji t diatas, diketahui nilai t_{hitung} sebesar 2,649 dimana hasil t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($df=30$, $\alpha=0,05$) sebesar 1,669 atau $2,649 > 1,669$. Selain itu, diketahui nilai Sig dari Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah adalah 0,013 atau lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

2. Pengawasan Keuangan

Berdasarkan hasil uji t diatas, diketahui nilai thitung sebesar 3,287 dimana hasil thitung lebih dari t_{tabel} ($df=30$, $\alpha=0,05$) sebesar 1,669 atau $3,287 < 1,669$. Selain itu, diketahui nilai Sig dari Pengawasan Keuangan adalah 0,000 atau lebih kecil 0,05 atau $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, yang artinya Pengawasan Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 9 Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	89,475	2	37,363	6,280	,006 ^b
	Residual	257,325	27	5,950		
	Total	346,800	29			

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Pada tabel 9, diketahui nilai F_{hitung} sebesar 6,280 dimana nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($df_1=2$, $df_2=27$, $\alpha=0,05$) sebesar 3,35 atau $6,280 > 3,35$. Selain itu diketahui bahwa nilai Sig. pada table ANOVA adalah 0,006 atau kurang dari 0,05 atau $0,006 < 0,05$, maka H_o ditolak dan H_a diterima, artinya Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Pengawasan Keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10 Hasil Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,361	5,262		2,919	,007
	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X1)	,592	,223	,459	2,649	,013
	Pengawasan Keuangan(X2)	,499	,130	,433	3,287	,000

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 10, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 15,361 + 0,592 X_1 + 0,499 X_2 + e$$

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,508 ^a	,258	,203	3,087

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 11 diperoleh angka koefisien determinasi (*adjusted R2*) sebesar 0,203 atau 20,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah dipengaruhi oleh Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (X1) dan Pengawasan Keuangan (X2) sebesar 0,203 atau 20,3%, sedangkan sisanya sebesar 79,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial didapat bahwa pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hertanto, Domai dan Amin 2016) yang menunjukkan bahwa variabel SIMDA terkait perannya dalam Administrasi yaitu mencakup pengumpulan data keuangan, perencanaan anggaran, pertanggungjawaban serta pelaporan anggaran. Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa SIMDA memberikan dampak terhadap kemudahan pengelolaan keuangan termasuk didalamnya pelaporan keuangan.

Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial didapat bahwa pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Armando, 2013) yang menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah dan hubungannya positif. Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa jika pengawasan keuangan dilakukan dengan teliti, baik, benar dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka akan memberikan dampak terhadap nilai informasi laporan keuangan. Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan, Pemerintah Kota Manado sudah melakukan Pengawasan Keuangan secara teliti, baik, benar dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan didapat bahwa pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dan pengawasan keuangan berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah bila di terapkan dengan Pengawasan Keuangan secara baik dan benar maka akan menghasilkan Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado yang sangat berkualitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado.
2. Pengawasan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado.
3. Pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dan Pengawasan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Agar nilai informasi laporan keuangan daerah dapat terjaga dengan baik, sebaiknya perlu adanya peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah dan pengawasan keuangan. Dengan peningkatan dan perbaikan tersebut akan mampu mengurangi adanya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan yang tidak memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Bagi peneliti berikutnya supaya dapat memperluas dan mengambil sampel dipemerintahan daerah lain. Karena penelitian ini hanya memfokuskan di Satuan Kerja Perangkat Daerah bagian Kantor Walikota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

Armando, G. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota

Deddy dan Nordiawan. 2014. *Akuntansi Pemerintahan*. Cetakan Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.

Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Salemba Empat.
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/article/view/898/807> .3 Februari 2019.

Hertanto, Domai dan Amin. 2016. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Di Kabupaten Blitar). *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 2(1): 15-24,
<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1424>. 1 Februari 2019.

Pujiswara. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Skripsi. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2880> . 27 Maret 2019.

Saren, Morasa dan Wokas. 2016. Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Emba* 2(1): 111-122.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14538/14105> .26 Juli 2019.

Sinarwati, Sujana dan Roshanti. 2014. Pengaruh Kualitas Sdm, Pemanfaatan Ti, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Skripsi.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2961>. 30 Februari 2019.

Wiboyo dan Edy. 2012. *Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian*. Gava Media, Yogyakarta.

Zuliatun. 2017. Pengaruh Kualitas SDM dan Penerapan Teknologi SIMDA Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Skripsi. <http://eprints.umpo.ac.id/3144/> .11 April 2019.

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah